#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki masa fenomena bonus demografi. Adapun fenomena bonus demografi yang terjadi di Indonesia dalam hal ini yaitu adanya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yakni di rentang usia 15 sampai 64 tahun dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (Turniasih & Dewi, 2016). Dalam ilmu ekonomi kependudukan, definisi bonus demografi sendiri dimaknai dengan adanya keuntungan yang bersifat ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah penduduk produktif yang kemudian dapat meningkatkan peluang terciptanya investasi dan peningkatan produktiftas masyarakat (Roziika & Nurwati, 2020). Akan tetapi fenomena bonus demografi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumberdaya masyarakatnya baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan (Jati, 2015).

Adanya fenomena bonus demografi yang tejadi di Indonesia tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana rancangan pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana tujuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional (Suparmoko, 2020). Peningkatan kualitas individu manusia tersebut juga akan berpengaruh pada kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dalam melakukan tahapan pembangunan yang berkelanjutan (Permadhy, 2020). Kualitas sumberdaya manusia salah satunya dipengaruhi oleh faktor kesehatan dari manusia itu sendiri. Sedangkan salah satu faktor yang mendukung dari terciptanya kualitas kesehatan manusia yaitu aktifitas olahraga masyarakat.

Melalui olahraga, manusia dapat meningkatkan kesehatan fisiknya maupun kebugaran fisik. Olahraga juga dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh (Pane, 2015). Selain itu, dalam bidang sosial masyarakat, olahraga juga dapat meningkatkan interaksi sosial, membangun hubungan

sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Oleh sebab itu, Pengaruh olahraga terhadap kualitas kesehatan masyarakat telah menjadi perhatian pemerintah di banyak negara.

Di Malaysia, pemerintahnya melalui Kementerian Belia dan Sukan memiliki program FIT Malaysia. Program tersebut memiliki konsep menanamkan olahraga sebagai gaya hidup bagi masyarakat dari berbagai usia dan segala kalangan agar terbentuknya kebugaran masyarakat. (Harian, 2023). Selain program FIT Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia juga menetapkan hari sukan negara yang di peringati setiap hari Sabtu pekan kedua di bulan Oktober. Peringatan hari olahraga di Malaysia tersebut merupakan inisiatif pemerintah dengan tujuan yang berfokus pada membudayakan olahraga untuk kesejahteraan dan persatuan masyarakat Malaysia. Pemassalan olahraga memiliki konsep yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga (Shariff, 2012). Sistem kompetisi dalam upaya menyediakan kesempatan yang sama berolahraga dapat memunculan jiwa kompetitif dari masyarakat yang kemudian akan berdampak pada munculnya motivasi juang agar masyarakat tersebut dapat meraih kemenangan (Shariff, 2012)

Selain negara Malaysia, negara Finlandia yang memiliki tingkat budaya berolahraga tinggi di benua Eropa, memiliki program "Sport for all" program tersebut di inisiasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, gerakan sport for all dirancang agar dapat menciptakan peluang bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur dan menikmati manfaat kesehatan, sosial, dan mental dari olahraga. Oleh sebab itu dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya inklusi sosial yaitu dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang mudah untuk berolahraga. (Sahala, 2011)

Lainnya halnya di Indonesia meskipun olahraga memiliki peranan penting terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya di

bidang kesehatan, akan tetapi masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam melakukan aktifitas olahraga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan dalam dokumen laporan capaian kinerja dari Deputi bidang pembudayaan olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Republik Indonesia (KEMENPORA-RI). Adapun data capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Persentase partisipasi penduduk umur 10 tahun keatas yang melakukan olahraga 2021-2022 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 2021 2022 ■ Target 35% 36% Realisasi 33% 31%

Gambar 1. Diagram batang Perbandingan capaian kinerja Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora- RI tahun 2021-2022

Sumber: Laporan kinerja Kemenpora tahun anggaran 2022

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan antara realisasi program dengan target partisipasi masyarakat berolahraga. Adanya temuan tidak tercapainya target indikator kinerja dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Republik Indonesia di bidang pembudayaan olahraga masyarakat. Selain itu, adanya tren penurunan realisasi dari partisipasi masyarakat dalam berolahraga menjadi sebuah permasalahan bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan olahraga. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam berolahraga yaitu salah satunya masih kurangnya wadah yang mengakomodir akan betapa pentingnya olahraga bagi masyarakat.

Selain temuan pada laporan realisasi kinerja Kemeneterian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan dokumen laporan nasional *Sport Development Index* tahun 2022 disajikan data tingkat partisipasi olahraga pada masyarakat yang mengalami adanya tren penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah usia manusia. Puncak tertingginya partisipasi masyarakat dalam berolahraga yaitu terjadi pada usia pelajar yakni umur 10 hingga 14 tahun. Dalam dokumen tersebut juga dikatakan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat akan berdampak pada tingkat kebugaran dari masyarakat. Sajian data terkait pola partisipasi olahraga masyarakat dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:

Pola partisipasi olahraga berdasarkan kelompok usia 30 27 25 20 16 15 Series 1 10 9 5 0 Kelompok 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 Usia

Gambar 2. Grafik partisipasi olahraga berdasarkan kelompok umur

Sumber: Laporan nasional dokumen Sport Development Index Kemenpora tahun 2022

Rendahnya tingkat partisipasi olahraga pada masyarakat kemudian berdampak pada banyak hal. Salah satunya yaitu pada kualitas kebugaran individu masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh data yang telah dipublikasikan pada laporan nasional *Sport Development Index* (SDI) oleh Kemenpora-RI tahun 2022 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang masuk kategori tidak bugar mencapai 76% dan dari angka tersebut yang memasuki kategori sangat tidak bugar sebesar 53,63% (Mutohir et al., 2022).

Sedangkan buruknya kualitas kebugaran masyarakat akan berdampak terhadap menurunnya tingkat produktifitas masyarakat itu sendiri yang kemudian akan berpengaruh juga terhadap terhambatnya tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya kolabolatif antara pemerintah dengan berbagai stakeholders dalam hal ini yaitu masyarakat dan sektor swasta yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Pembangunan budaya olahraga tersebut perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga kebugaran dan kesehatan daya tubuhnya. Pemassalan olahraga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh masyarakat, sehingga terciptanya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan olahraga. Pemassalan olahraga bagi masyarakat harus memiliki konsep kesetaraan dan berkeadilan hal tersebut ditujukan agar terwujudnya inklusi sosial pada masyarakat.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat terhadap olahraga yaitu dengan diterbitkannya Peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Selain bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga masyarakat, Perpres nomor 86 tahun 2021 tersebut juga diterbitkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas maupun sinergitas untuk pembangunan olahraga nasional.

Pemerintah telah mengadopsi kebijakan dan program yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga seperti pengembangan pada infrastruktur olahraga, peningkatan aksesibilitas, dan pendidikan mengenai manfaat olahraga. Salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya pemassalan olahraga yaitu dengan dibuatnya Program Kejuaraan antarkampung. Program tersebut dibuat guna menyasar daerah-daerah yang jarang diadakan festival olahraga berskala nasional. Oleh sebab itu, pemerintah melaksanakan program tersebut di 32 titik lokasi di Indonesia

Dengan adanya program tersebut menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya olahraga dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Akan tetapi dalam pengimplementasian di lapangan, program maupun kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dapat dikatakan belum maksimal. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam hal ini melalui kegiatan "Kejuaraan Antarkampung Kementerian Pemuda dan Olahraga 2023" sebagai upaya untuk melakukan pembudayaan olahraga pada hingga ke plosok daerah.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian riset ini antara lain sebagaimana berikut:

- 1. Bagaimana Implementasi program pemerintah tersebut dalam pembudayaan olahraga masyarakat ?
- 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi program pemerintah tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian riset ilmu pemerintahan ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Mengetahui hasil implementasi program pemerintah dalam pembudayaan olahraga masyarakat
- 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari riset ilmu pemerintahan ini terbagi menjadi 2 bagian sesuai peruntukannya masing-masing. Adapun bagian tersebut antara lain:

### 1.4.1. Manfaat Akademis

Dari segi akademis baik itu konsep maupun teori pendukung, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan maupun sebagai bahan rujukan dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai perumusan sebuah kebijakan dalam meningkatkan pembudayaan olahraga masyarakat. Selain itu penelitian ini memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu pemerintahan khususnya pada mata kuliah kebijakan publik.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktisnya, temuan-temuan yang telah disusun dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan yang telah dibuat maupun sebagai bahan penyusunan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan program pemassalan olahraga masyarakat. Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Republik Indonesia dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan dinamika permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat.

## 1.5. Definisi Konseptual

Definisi konsep akan memberikan fokus serta ruang lingkup yang mempermudah dalam penelitian. Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Definisi konseptual dalam penelitian juga membantu memahami konsep-konsep kunci, teori, variabel, dan hubungan dalam penelitian, serta membangun *framework* atau kerangka kerja yang kokoh dan jelas bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Definisi konseptual dari masingmasing variabel adalah sebagai berikut.

## 1.5.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu bagian tahapan dalam melakukan analisis kebijakan. Kata "implementasi" sendiri memiliki arti yaitu sebuah penerapan dalam sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi dalam kajian kebijakan publik merupakan pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Implementasi juga mengacu pada tujuan dan manfaat dari sebuah rencana kebijakan tersebut.

Sedangkan model kebijakan sendiri menurut Inu Syarif (2005) yang sesuai dengan kondisi permasalahan bangsa saat ini adalah model yang mengacu pada sistem memperhatikan berbagai desakan maupun masukan dari lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat dalam hal ini meliputi tuntutan, hambatan, dukungan, ujian dan kebutuhan atau keperluan masyarakat bukan mengacu pada kepentingan pribadi atau kelompok saja tanpa melihat dampaknya terhadap masyarakat umum (Syafiie, 2005).

Sebuah kebijakan publik tersebut harus diimplementasikan agar publik dapat merasakan tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pengimplementasian yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang kemudian berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun proses pengimplementasian kebijakan dapat dilaksanakan jika tujuan kebijakan telah ditetapkan, program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mendukung jalannya kebijakan tersebut.

Sedangkan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dalam tesis yang dibuat oleh (Nurani, 2009) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial disebabkan pada dampaknya, seberapa baik sebuah kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai (Nurani, 2009). Oleh sebab itu dalam mencapai tujuan kebijakan, maka diperlukan perumusan dan pengimplementasian yang telah dipersiapkan dengan baik.

Teori Edward III dalam (Huda, 2021) mengatakan bahwa ada 4 komponen penting dalam mendukung proses implementasi kebijakan. Komponen terebut antara lain: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap, dan Struktur birokrasi (Huda, 2021). Semua komponen tersebut harus dapat berjalan seiringan dan berinteraksi satu sama lainnya agar terwujudnya implementasi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk mewujudkan maupun

menjalankan sebuah kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut dapat terlaksana. Implementasi kebijakan juga dikatakan sebagai salah satu unsur penting dalam rangkaian sebuah kebijakan dikarenakan pada proses implementasi tersebut merupakan bentuk perwujudan dari kebijakan yang telah direncanakan yang kemudian dapat menyentuh dan berdampak pada permasalahan di lingkungan masyarakat.

## 1.5.2. Pembudayaan

Pembudayaan merupakan sebuah proses dari perbuatan membudayakan suatu hal menjadi sebuah kebiasaan.. Meskipun demikian, budaya tidak hanya terbentuk dalam sebuah aktfitas saja. Budaya juga memiliki ruang lingkup kepercayaan, sistem sosial, adat istiadat, norma, pemikiran maupun pengetahuan (Kistanto, 2017). Dalam konsepsi budaya, nilai yang tertuang pada suatu budaya dipertahankan yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya juga mencakup pola-pola berpikir, etika, hukum, dan peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat.

Budaya sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan kebiasaan masyarakat pernah di ungkapkan oleh seorang antropolog Amerika, Leslie A. White (1900-1975) dalam Kistanto (2017) ia mengatakan bahwa "Budaya merupakan sistem terintegrasi yang terdiri dari pola perilaku yang dipelajari, ide-ide, nilai-nilai, dan produk material yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan sosial" (Kistanto, 2017). Budaya memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, serta memberikan kerangka acuan untuk memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain.

Pembudayaan olahraga dalam hal ini merupakan bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. Dalam konsep partisipasi, Nasdian (2006) dalam Rosyida (2011) mengatakan bahwa partisipasi dalam pengembangan suatu tujuan tertentu harus melahirkan keikutsertaan maksimal dari masyarakat tersebut agar

dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011).

Kesimpulan dari berbagai penjelasan diatas yaitu definisi konseptual dari pembudayan tersebut kemudian menggambarkan budaya sebagai suatu sistem kompleks yang mencakup beragam unsur dan dimensi, yang berperan dalam membentuk pola pikir, nilai-nilai, perilaku, dan interaksi manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat.

## 1.5.3. Olahraga Masyarakat

Olahraga merupakan sebuah kegiatan atau aktifitas yang melibatkan fisik manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan dan keterampilan motorik pada manusia. Berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, Olahraga Merupakan segala bentuk kegiatan yang bersifat sistematis dengan tujuan mendorong, melatih serta membangun potensi jasmani, rohani dan sosial dalam diri manusia. Dalam undang-undang tersebut juga telah membagi 3 ruang lingkup olahraga. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pembagian 3 ruang lingkup utama bertujuan dalam pembangunan keolahragaan nasional. 3 ruang lingkup tersebut antara lain: Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, Olahraga prestasi

Penelitian ini berfokus terhadap kegiatan olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat sendiri erat kaitannya dengan segala aktifitas masyarakat yang dilakukan berdasarkan kegemaran dan minat masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran dari masing-masing individu. Jenis olahraga ini menjadi salah satu komponen penting dalam hal meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pada lingkungan masyarakat. Olahraga memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial masyarakat. keterkaitan tersebut yaitu dimana individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga bersama dengan orang lain, membentuk tim atau komunitas, dan berinteraksi melalui kompetisi atau kerjasama. Olahraga juga dapat memberikan manfaat psikologis, seperti mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan memperkuat rasa percaya diri.

## 1.6. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir mengacu pada teori maupun konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun ke 4 komponen dari model implementasi Edward III jika terapkan pada proses implementasi program Kejuaraan Tarkam Kemenpora 2023 dapat dilihat pada kerangka berfikir dibawah ini:

Komunikasi **Sumberdaya** Sosialisasi Teknis program Sumberdaya pelaksana Kejuaraan Tarkam Kejuaraan Tarkam Kemenpora Kemenpora Roadmap kegiatan program Sumberdaya anggaran Kesesuaian peraturan pada program Kejuaraan tarkam **Implementasi Program** Kejuaraan Antarkampung Kemenpora 2023 Struktur birokrasi **Disposisi**  Pelaksana Kebijakan (Tugas Kapabilitas pelaksana program dan Kewenangan) Kejuaraan Tarkam Kemenpora • Standar operasional prosedur 2023 penyelenggaraan program • Komitmen pembinaan dan Kejuaraan Tarkam Kemenpora pengembangan olahraga rekreasi

Bagan 1. Kerangka berfikir Model Implementasi (Edward III)

Kerangka berfikir diatas didasarkan pada model implementasi menurut George Edward III. Model tersebut kemudian yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam melihat tahapan implementasi dari program Kejuaraan antarkampung (TARKAM) Kemenpora tahun 2023. Berdasarkan pada kerangka berfikir diatas, ada 4 komponen yang saling berkaitan antar satu

komponen dengan komponen lainnya. 4 komponen tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keterkaitan antar komponen tersebut akan berpengaruh terhadap hasil dari proses implementasi kebijakan. Pada indikator komunikasi keterkaitannya dengan sumberdaya pelaksana program yaitu sumberdaya manusia sebagai pelaksana teknis dapat memahami dan mengetahui tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Jika proses komunikasi seperti transmisi informasi dan konsistensi kejelasan komunikasi telah dilaksanakan maka sumberdaya pelaksana pada program tersebut dapat memahami apa yang akan dikerjakan.

Selain komunikasi yang berhubungan dengan sumberdaya, peran komunikasi juga menunjukan adanya keterkaitan hubungan dengan bagaimana sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pola komunikasi juga akan mempengaruhi bagaimana bentuk komitmen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pembinaan pengembangan olahraga masyarakat di Indonesia.

Adapun keterkaitan hubungan standar operasional prosedur dalam komponen struktur birokrasi akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap pelaksana dalam menentukan sumberdaya manusia berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk menjalankan program tersebut. Selain itu, standar operasional prosedur pada program Kejuaraan antarkampung memiliki hubungan dengan kesesuian peraturan maupun roadmap program tersebut. Standar operasional prosedur juga disusun dan dibentuk berdasarkan pada komitmen kebijakan dalam melakukan pelaksana pembinaan pengembangan olahraga rekreasi di Indonesia. Peraturan maupun roadmap tersebut kemudian yang akan ditransmisikan informasinya melalui pelaksanaan bimbingan teknis kepada seluruh sumberdaya pelaksana yang terlibat dalam program tersebut.

### 1.7. Definisi operasional

# 1.7.1. Implementasi Program Kejuaraan Tarkam Kemenpora

1. Tahapan komunikasi pada pelaksanaan kegiatan Kejuaraan antarkampung

- a. Pelaksanaan Bimtek bagi penyelenggara kegiatan
- b. Roadmap kegiatan Kejuaraan antarkampung
- c. Penyusunan buku panduan penyelenggara kegiatan
- 2. Sumberdaya program Kejuaraan Tarkam Kemenpora
  - a. Sumberdaya anggaran kegiatan
  - b. Sumberdaya manusia pelaksana kegiatan
- 3. Sikap pelaksana program Kejuaraan Tarkam Kemenpora
  - a. Komitmen pada tugas dan fungsi pelaksana kegiatan
  - b. Kapabilitas pelaksana program Kejuaraan antarkampung
- 4. Struktur birokrasi pembudayaan olahraga
  - a. Tugas dan Kewenangan pelaksana Kebijakan
  - Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan kegiatan (Permenpora Nomor 6 tahun 2022 tentang peta jalan desain besar olahraga nasional periode tahun 2021-2024)

## 1.8. Metode penelitian

## 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan teknik analisis objek penelitian dengan menggunakan kajian maupun teori tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan bentuk pengamatan terhadap objek yang akan diteliti secara langsung..

# 1.8.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Riset penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan terhitung mulai hari pertama kami melaksanakan magang. Adapun lokasi riset penelitian yaitu bertempat di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Republik Indonesia, Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

### 1.8.3. Jenis Data

Jenis data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu 2 jenis data, antara lain data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara terjun lapang. Adapun data primer tersebut bersumber dari data yang dimiliki oleh instansi maupun data hasil interview langsung dengan stakeholders terkait. Salah satu data yang dimiliki oleh instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dokumen laporan kegiatan pelaksanaan kejuaraan antarkampung tahun 2023. Sedangkan data interview pada penelitian ini didasarkan pada hasil interview dengan Ibu Rika Aninggar Fitriasari, S.Pd selaku ketua tim pengembangan model festival/pekan/kejuaraan pada asisten olahraga pendidikan, deputi bidang pembudayaan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga
- b. Data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian, adapun data sekunder tersebut antara lain bersumber dari bahan bacaan baik dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan topik penelitian ini.

## 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 metode. Adapun 3 metode tersebut antara lain:

### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang kemudian di analisis guna menunjang informasi dalam penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat argumen maupun kebeneran data yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan dokumentasi pada penelitian ini bersumber dari dokumen seperti laporan, dan dokumen peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan kegiatan Kejuaraan antarkampung maupun dokumen yang berkaitan dengan pedoman pengembangan dan pembinaan olahraga masyarakat di Indonesia.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menghimpun informasi yang berasal dari narasumber atau informan dalam objek sebuah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara lansgung untuk dapat menggali informasi lebih dalam dan terbuka terkait topik penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu mereka baik secara individu maupun kelompok yang memiliki pengetahuan mendalam terkait isu dan situasi yang sesuai dengan tema penelitian ini

### c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui pengamatan dan penginderaan langsung dilokasi penelitian. Observasi dilaksanakan pada saat awal penentuan lokasi penelitian dengan melakukan pra survey hingga pengumpulan data yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini mencoba mempelajari dan memahami perilaku orang-orang yang terlibat baik saat perumusan kebijakan maupun saat pengimplementasian kebijakan. Adapun kebijakan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA) dalam hal pemassalan olahraga masyarakat.

## 1.8.5. Teknik Analisis Data

Penyusunan pada laporan akhir penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif berupa analisis terhadap dokumen dan informasi yang telah didapatkan pada pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain itu,pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis stakeholder untuk menggali lebih dalam informasi yang ada dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam teknik analisis data, ada 3 tahapan yang dilalui hingga dapat disusunnya sebuah karya ilmiah. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pengklasikasian data yang semulanya bersifat kumpulan data kompleks menjadi kumpulan data terstruktur. Dalam tahapan ini juga terjadi proses mempersempit cakupan data yang kemudian dilakukannya penghapusan data informasi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Tahapan reduksi data pada penelitian ini hanya difokuskan pada dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan data pelaksanaan program kejuaraan antarkampung Kementerian Pemuda dan Olahraga

## b. Penyajian data

Dalam tahapan ini merupakan tahapan untuk menarasikan dan mendeskripsikan temuan pada data maupun informasi yang telah diolah sebelumnya. Penyajian data pada penelitian ini disajikan dengan berbagai bentuk seperti narasi analisis, tabel maupun grafik yang sesuai dengan implementasi program Kejuaraan antarkampung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada tahapan ini juga dilakukan penjelasan tentang hasil temuan yang telah ditentukan pada rumusan masalah penelitian ini.

# c. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan bentuk proses lanjutan dari penggabungan antara reduksi data dengan penyajian data yang kemudian ditarik kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Pada tahapan kesimpulan ini juga dapat mengetahui bagaimana proses implementasi pada program kejuaraan antarkampung dalam upaya pembudayaan olahraga masyarakat di Indonesia.